

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(ILPPD)

KABUPATEN MALANG TAHUN 2014



BUPATI MALANG



**WAKIL BUPATI
MALANG**



A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965; dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Malang.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut ILPPD adalah Informasi yang berisi laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

ILPPD Kabupaten Malang tahun 2014 adalah ILPPD tahun kelima periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 sampai dengan 2015, yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara normatif harus disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran 2014 berakhir.

ILPPD Kabupaten Malang tahun 2014 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan runag lingkup pembahasan mencakup Urusan Pemerintahan, Urusan Perbantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17'10,90''$ – $112^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ – $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: *Sebelah Utara*: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; *Sebelah Timur*: Kabupaten Lumajang; *Sebelah Selatan*: Samudera Indonesia; *Sebelah Barat*: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian *tengah* wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).



Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

2. Kondisi Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2014 sebesar 2.527.087 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,73% per tahun terdiri dari laki-laki 1.269.613 (50,25%) dan perempuan 1.257.474 (49,75%) dengan rata-rata kepadatan 780 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2014 adalah sebesar 3.092.714 jiwa terdiri dari laki-laki 1.549.678 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.543.036 jiwa (49,90%). Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1). Potensi Pertanian

Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang. Hortikultura unggulan yang dimiliki adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh



kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur.

2). **Potensi Peternakan**

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.

3). **Potensi Perikanan**

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya.

4). **Potensi Industri**

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, jalan lintas selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, Minapolitan Wajak, serta Kajian Taman Vulkania Bromo. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir.



5). **Potensi Pertambangan**

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan yaitu emas, pasir besi, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

6). **Potensi Pariwisata**

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun 2013 sebesar Rp46.830.737,76, dan tahun 2014 mencapai sebesar Rp53.794.768,47. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2013 sebesar Rp17.901.923,01, dan akhir tahun 2014 sebesar Rp18.992.150,12. Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,65% sedangkan Inflasi pada tahun 2013 sebesar 7,86%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,09% dikarenakan pada tahun 2014 Inflasi Naik menjadi sebesar 8,28%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan



pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu terjadinya kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya pendapatan perkapita tahun 2013 sebesar Rp18.630.284,77, dan tahun 2014 sebesar Rp19.247.046,-. Kontribusi sektoral pada tahun 2014 tidak dapat dirinci karena adanya perubahan tahun dasar dari 2000 menjadi 2010, sehingga yang semula kontribusi PDRB dibagi menjadi 9 Sektor nantinya akan berubah menjadi 17 sektor, dengan adanya perubahan tahun dasar tersebut maka kontribusi sektoral tahun 2014 dapat diketahui pada pertengahan tahun 2015.

Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor B.025/Sesmen-PDT/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan *Updating* Status Desa tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati Malang Nomor 050/999/421.203/2010, tanggal 15 April 2010, perihal *Updating* Desa Tertinggal dan Maju, terdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala BPM Kabupaten Malang Nomor:414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 Nopember 2012, perihal hasil *Self Assesment* Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa Tertinggal dan pada tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal. Selanjutnya pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/478/KEP/421.013/2014 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2014 terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal serta pada tahun 2015 ditargetkan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal akan ditingkatkan menjadi status desa maju atau sangat maju.

C. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

1. Visi dan Misi

a. Visi

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010–2015



yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri,
Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing
(MADEP MANTEB)***

b. Misi

Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya;
- 2) Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis;
- 3) Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Azasi manusia (HAM);
- 4) Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai;
- 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- 7) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- 8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

2. Prioritas Pembangunan Tahun 2014

Tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 adalah:

“Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing” dengan prioritas pembangunan

**sebagai berikut:**

- a. Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana *ekowisata* dan pasar-pasar daerah;
- b. Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
- c. Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan;
- f. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan;
- g. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal; dan
- h. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI**1. Pendidikan**

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara, hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah, sehingga pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan



kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pematapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang kurang, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya-tidaknya selama 9.tahun. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Adapun capaian kinerja urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa dibawah usia 6 Tahun dan diatasnya, pada Tahun 2014 Jumlah siswa dibawah usia 6 Tahun adalah 83,246 dan jumlah siswa diatas 6 tahun adalah 118.806. dengan demikian APM PAUD mempunyai capaian kinerja 70.07 %, sehingga target yang telah ditetapkan sudah terpenuhi.

2) Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;

a. Angka Kelulusan (AL) diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan jumlah siswa tingkat terakhir, seperti contoh pada tahun 2014 AL SD/MI yang lulus adalah 39,894 dan SD/MI Tertinggi adalah 39,894 juga, sehingga capaian Kinerja AL SD/MI adalah 100.00 %. Sedangkan untuk AL SMP/MTS adalah 31.540 baik yang lulus maupun yang jenjang tertinggi, sehingga capaian kinerja AL SMP/MTS adalah 100.00 %.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) diukur berdasarkan jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 Tahun, seperti contoh APM SD/MI pada tahun 2014 dengan jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun adalah 224.712 dan jumlah kelompok usia 7 – 12 Tahun adalah 226.246, sehingga capaian kinerja untuk APM SD/MI adalah 99.32 %. Sedangkan untuk APM SMP/MTS dengan jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun adalah 102.249 dan jumlah kelompok usia 7 – 12 Tahun adalah 128.125, sehingga capaian kinerja untuk APM SMP/MTS adalah 79.80 %.



- c. Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2014 menunjukkan bahwa ada siswa yang putus sekolah pada jenjang SD/MI adalah 192 dari jumlah siswa pada jenjang SD/MI sebanyak 224.572, sehingga capaian APS SD/MI adalah 0.09 %. Sedangkan APS SMP/MTS tahun 2014 menunjukkan bahwa ada siswa yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTS adalah 584 dari jumlah siswa pada jenjang SMP/MTS sebanyak 105.006, sehingga capaian APS SMP/MTS adalah 0.56 %.
 - d. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTS, pada tahun 2014 dengan jumlah siswa pada jenjang SD/MI yang lulus ujian tingkat akhir 39.397 dan siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTS adalah 35.998,
- 3) Program Pendidikan Menengah;
- a. Pada tahun 2014 AL SMA/MA yang lulus adalah 18.520 dan SMA/MA Tertinggi adalah 18.528 juga, sehingga capaian Kinerja AL SMA/MA adalah 99.96 %.
 - b. APM SMA/MA pada tahun 2014 dengan jumlah siswa usia 16 - 18 Tahun adalah 53.607 dan jumlah kelompok usia 16 - 18 Tahun adalah 113.133, sehingga capaian kinerja untuk APM SMA/MA adalah 47.38 %.
 - c. Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2014 menunjukkan bahwa ada siswa yang putus sekolah pada jenjang SMA/MA adalah 204 dari jumlah siswa pada jenjang SMA/MA sebanyak 68.860, sehingga capaian APS SMA/MA adalah 0.30 %.
 - d. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS ke jenjang SMA/MA, pada tahun 2014 dengan jumlah siswa pada jenjang SMP/MTS yang lulus ujian tingkat akhir 23.667 dan siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA adalah 30.526, sehingga capaian kinerjanya adalah 77.53 %.
- 4) Program Pendidikan Non Formal;
- Program pendidikan non-formal yang dimaksud dalam hal ini adalah program luar sekolah yang dilakukan untuk menekan jumlah penduduk yang buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf, angka melek huruf dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibandingkan jumlah usia penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2014, penduduk Kabupaten Malang usia 15 tahun keatas adalah 1.569.359 jiwa sedangkan yang bisa baca tulis sebesar 1.550.838, sehingga sudah mencapai target 98.82 %.



5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat memenuhi standar kualifikasi, yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dengan jumlah tenaga pendidik. Pada tahun 2014 jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Malang adalah 31.003, dari jumlah tersebut sebanyak 23.284 telah memenuhi standar kualifikasi, sehingga telah mencapai target 75.10 %.

Dengan demikian Kabupaten Malang telah melaksanakan semua program nasional pada urusan pendidikan.

2. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan, harusnya menjadi perhatian utama semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 58 Puskesmas Keliling, 14 ambulance, serta melakukan penguatan terhadap 2.816 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat).

Untuk program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) dilaksanakan melalui pelayanan kepada ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas beserta



bayinya yang keseluruhannya telah dijamin pemerintah melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang telah menjalin kerja sama dengan program tersebut.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen dan Lawang, berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan.

Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi dari keberhasilan program-program yang dilakukan antara lain dapat dinilai melalui indikator Indeks Kesehatan. Adapun capaian kinerja urusan Kesehatan dengan beberapa cakupan sebagai berikut :

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, meliputi Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 8.048 dengan Jumlah ibu komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 9.023, sehingga capaian kinerjanya adalah 89.10 %.
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, meliputi Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 43.549 sedangkan Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama adalah 43.549, sehingga target kerja mendapat 100.00 %.
- c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), meliputi Jumlah seluruh Desa / Kelurahan adalah 390, sebagaimana dari 342 merupakan Jumlah Desa / kelurahan UCI, sehingga capaian kinerjanya mencapai 87.68 %
- d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, meliputi Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 159, dengan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang



- ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama juga 159, sehingga target 100.00 %.
- e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, meliputi Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama adalah 2.702, dengan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun sebanyak 924, sehingga capaian kinerja sebesar 34.20%.
 - f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, meliputi Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun adalah 834, dengan Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama adalah 834, sehingga target 100.00 % terpenuhi.
 - g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, meliputi Jumlah seluruh Maskin di Kab Malang 713.577, dengan 58.260 Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1, sehingga capaian kinerjanya adalah 8.16 %.
 - h. Cakupan kunjungan bayi, meliputi Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama adalah 40.104, dengan 39.520 Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, sehingga capaian kinerja 98.54 %.

3. Lingkungan hidup

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Telah dipahami bersama bahwa kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan, walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh antara lain: masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan, masih lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup bahkan sampai



mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dan masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang lingkungan hidup, misalnya belum dipatuhinya peraturan perihal limbah buangan seperti dapat dilihat dari masih tingginya pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga, tingginya pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan, serta belum optimalnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan antara lain: pemantauan dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme Program Peningkatan Perusahaan (PROPER); pengelolaan sampah serta pemantauan tingkat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pemantauan kualitas udara dan kualitas air; konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis; dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan kegiatan dan capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Penanganan sampah, dengan Volume produksi sampah (m³) sebanyak 5.097, dengan Volume sampah yang ditangani (m³) adalah 784, sehingga capaian kinerjanya adalah 15.38 %.
- b. Kebersihan, meliputi jumlah seluruh pasar adalah 33 dan 25 pasar yang tergolong baik, sehingga 75.76 % memenuhi target.
- c. Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk, meliputi Jumlah Penduduk sebanyak 3.092.714, dengan Jumlah daya tampung TPS (m³) adalah 768.960, sehingga capaian kinerjanya adalah 24.864 %.
- d. Penegakan hukum lingkungan, meliputi 100 Jumlah kasus lingkungan yang ada, dan 100 pula yang diselesaikan pemda, sehingga telah mencapai 10.00 % target.

4. Pekerjaan umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital guna mempercepat proses pembangunan. Peranan pentingnya sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.



Belanja pengeluaran terbesar disamping untuk pendidikan dan kesehatan adalah untuk infrastruktur, maka didalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang mantap, sehingga diharapkan alokasi belanja yang digunakan untuk infrastruktur mampu menstimulasi pertumbuhan dan pendistribusian ekonomi masyarakat.

Salah satu sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah di bidang prasarana jalan. Tersedianya prasarana jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Prasarana jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional dan nasional dapat berjalan lancar.

Prasarana yang lain adalah di bidang pengairan dimana salah satu arah kebijakan adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi sesuai kewenangannya dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Prasarana keciptakaryaan diarahkan antara lain untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target MDG's guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum, serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/ terdesentralisasi guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi. Adapun program dan capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

- a. Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan, dimaksud untuk mendukung pencapaian indikator lama jam sibuk yangmana meliputi jalan di Kabupaten malang yang dalam kondisi baik adalah 146.568, dengan panjan jalan Kabupaten Malang adalah 166.876, sehingga telah memenuhi target 87.83 .
- b. Program Irigasi Sawah, ditujukan guna memacu etensitas kesuburan tanah, sehingga bumi Kabupaten Malang kaya akan hasil pertanian, maka diperoleh data Luas irigasi



kabupaten 887.751.3, dengan kondisi baik sebanyak 557.973.98, sehingga capaian kinerjanya adalah 62.85 %.

- c. Program pembangunan jaringan air bersih, meliputi Jumlah total rumah tangga 724.956 dan 534.542 yang bersanitasi, sehingga 73.73 % terpenuhi. Sedangkan luas wilayah kabupaten malang 61.374, dengan 3.319 wlayah kumuh, sehingga 5.41 % target tercapai.

5. Penataan ruang

Penataan ruang merupakan matra ruang program pembangunan Kabupaten Malang, sehingga harus terdapat sinkronisasi antara program pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJP/ RPJM Kabupaten Malang, maupun berbagai program sektor terkait. Salah satu hal berkenaan dengan penataan ruang Kabupaten Malang harus mencakup upaya terkait pertumbuhan wilayah, pengurangan kesenjangan internal antar wilayah terutama bagi wilayah yang memiliki beberapa kantong kemiskinan, mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang termasuk upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi Luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 3.534.860.000, dengan cakupan 38.898 ruang luas terbuka hijau, sehingga capaian kinerja sebesar 0.011 %.

6. Perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Dalam melakukan perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai, karena perencanaan pembangunan dimaksud akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin



dicapai bisa terwujud, baik antar sektor maupun antar waktu. Sinergisitas pembangunan antar sektor merupakan kesesuaian program pembangunan antar sektor sehingga tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung. Sedangkan sinergisitas pembangunan antar waktu merupakan keberlangsungan program pembangunan (*sustainable development*) dari waktu ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut tercapai. Dan 100.00 % dokumen Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD dapat disusun tepat waktu.

7. Perumahan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), diamanatkan bahwa; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Amanat tersebut menjelaskan bahwa rumah merupakan hak setiap orang untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.

Pembangunan perumahan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja.

Beberapa isu strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut *Backlog* (defisit rumah rakyat). Isu yang lain adalah cakupan pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh.

Sasaran umum pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah meningkatnya akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*).



Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga di Kabupaten Malang dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan. Adapun kegiatan serta capaian kinerja urusan perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Rumah Tangga pengguna air bersih, meliputi 724.956 jumlah rumah tangga di kabupaten malang, dengan yang menggunakan air bersih sebesar 480.599, sehingga 66.29 % target terpenuhi.
- b. Luas wilayah kabupaten malang adalah 61.374, dengan rincian liangkungan kumuh adalah 3.319, sehingga 5.41 % dari luas wilayah yang terjangkau lingkungan kumuh. Sedangkan jumlah seluruh rumah adalah 460.174 dan yang layak huni sebesar 423.522, sehingga 92.04 % telah memenuhi target rumah layak huni di Kabupaten Malang.

8. Kepemudaan dan olahraga

Kebijakan pengarusutamaan pemuda dan olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihny tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur Pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Kebijakan pengarusutamaan pemuda dimaksudkan sebagai strategi yang sistematis untuk melibatkan pemuda dalam setiap level struktur, pengambilan kebijakan dan proses pembangunan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana keterlibatan dimungkinkan terjadi. Jumlah penduduk Kabupaten malang adalah 3.092.714, dengan Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten sebesar 772, sehingga capaian kerjanya adalah 0.25 %. Sedangkan jumlah lapangan olahraganya adalah 1528, meliputi 783 Lapangan Sepak Bola, basket 35, voley 457, bulu tangkis 249, dan 4 lapangan renang, sehingga capaian kinerja adalah 0.49 %.



9. Penanaman modal

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi. Pada tahun 2014 sebesar 75.45 % apabila berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 80 %, maka capaian kinerjanya adalah 88.31 %.

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan UMKM diharapkan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing.

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, peran Pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Peran Pemerintah yang perlu dimainkan dalam program pemberdayaan, adalah anggaran yang dikeluarkan bukan semata-mata merupakan alokasi dana sosial, namun dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha dimaksud, sehingga program pemberdayaan yang akan dilakukan perlu dirumuskan terlebih dahulu dengan memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM. Adapun kegiatan beserta capaian kinerja urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan adalah :



- a. Jumlah seluruh koperasi di wilayah kabupaten malang adalah 1.104 dan 1.009 yang aktif, sehingga 91.39 % telah memenuhi target.
- b. Jumlah usha mikro dan kecil, meliputi 414.516 UKM dan 413.285 usaha makro dan kecil, sehingga 99.70 % telah memenuhi target.

11. Kependudukan dan catatan sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap. Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada 33 kecamatan se-Kabupaten Malang secara bergiliran.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah) sebesar 1.962.776 dan 1.713.752 yang sudah memiliki KTP, sehingga 87.31 % mencapai target.
- b. Jumlah Penduduk Kabupaten malang adalah 3.092.714 dan memiliki akta kelahiran adalah 920.590, sehingga 97.66 % target terpenuhi.



12. Ketenagakerjaan

Persoalan ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dan sampai saat ini, masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah dan *stakeholders* lainnya karena kompleksitasnya. Hal ini dipersulit oleh kondisi lingkungan perkembangan dunia yang semakin global dengan persaingannya yang semakin ketat, penggunaan teknologi yang semakin canggih terutama dalam bidang komunikasi, transportasi dan produktivitas kerja, serta kondisi politik dan hukum nasional, serta lokal yang kesemuanya masih menjadi tantangan berat bagi persoalan ketenagakerjaan. Karenanya Pemerintah perlu memiliki arah kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan ke depan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Adapun kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

- a. Data Jumlah Buruh / Pekerja di Kabupaten Malang adalah 69.606, dengan jumlah 52.278 yang memiliki jamsostek aktif, sehingga capaian kinerjanya adalah 75.11 %.
- b. Data Jumlah pencari Kerja sebesar 3.500, dengan 3.174 sudah memiliki kerja, sehingga 90.69 % telah memenuhi target.

13. Ketahanan pangan

Konsep ketahanan pangan (*food security*) berorientasi pada konsep ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan dimaksud, bilamana salah satu dari unsur di atas bila tidak terpenuhi, maka suatu daerah belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik.

Penjabaran ketahanan pangan yang mengandung unsur ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat tersebut lebih luas lagi harus dijabarkan menjadi ketersediaan secara fisik kuantitasnya, kualitasnya dan keberlanjutannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sedangkan aksesibilitas masyarakat meliputi distribusi, konsumsi, dan keamanan. Distribusi berperan untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan cepat dan terjangkau, konsumsi berhubungan dengan keanekaragaman dan mutu pangan yang dikonsumsi tidak hanya cukup mengenyangkan tetapi juga berkualitas, sedangkan keamanan meliputi dua aspek yaitu aman dari sisi fisik tidak tercemar bahan berbahaya baik bahan



kimia, biologi, maupun cemaran yang lain maupun aman dari segi akidah yaitu kehalalannya. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Malang adalah 3.092.714 Jiwa, dengan 282.576 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg), sehingga 91.37 % telah memenuhi target.

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak sesuai penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan dilaksanakan melalui beberapa hal sebagai berikut: upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, peraturan daerah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta operasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, seperti pelatihan bagi konselor, Forum *Group Discussion* lintas jejaring pelaksana SPM dan intervensi lembaga P2TP2A melalui peningkatan ekonomi dan advokasi hukum dan psikologi bagi korban dan keluarganya; dan data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak. Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :



- a. Data Jumlah pekerja wanita sebesar 560.613, dengan jumlah 7.857 yang bekerja di Pemerintah, sehingga capaian kinerjanya adalah 1.40 %
- b. Data Jumlah anak perempuan usia>15 adalah 170.571, dengan Jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf sebesar 169.761, sehingga 99.53 % telah memenuhi target.
- c. Data Jumlah angkatan kerja perempuan adalah 902.479, dengan jumlah 560.613 partisipasi angkatan kerja perempuan, sehingga capaian kinerjanya adalah 62.12 %

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini meliputi: pemberdayaan keluarga termasuk langkah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; promosi dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja; promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang difokuskan kepada peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, terutama bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I); serta penguatan kelembagaan agar secara bertahap program KB dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri. Keseluruhan kebijakan ini akan dilaksanakan dengan mengutamakan kemitraan, serta memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Adapun kegiatan beserta capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

- a. Data Jumlah pasangan usia subur adalah 521.995, dengan Jumlah peserta program KB aktif sebesar 397.748, sehingga 76.20 % telah memenuhi target.
- b. Data Jumlah PLKB/PKB adalah 111, dengan 390 jumlah desa, sehingga capaian kinerjanya adalah 3.51 %.



16. Perhubungan

Arah pengembangan perhubungan dalam lingkup nasional meliputi penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (*feeder*). Sedangkan dalam lingkup regional pengembangan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas. Adapun Jumlah penumpang angkutan darat sebesar 3.092.714, dengan 2.070.880 jumlah angkutan darat, sehingga capaian kinerjanya adalah 66.96 %

17. Komunikasi dan informatika

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum apabila tidak digunakan secara bijak.

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi



merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, khususnya pengelolaan informasi yang menggunakan sistem elektronik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan kegiatan 4 x pameran expo yang telah dilakukan.

18. Pertanahan

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah antara lain: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah; Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua



pemangku dan pengampu kepentingan; Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat; dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

- a. Pendataan tanah, meliputi Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah adalah 17.310.580, dengan Luas lahan bersertifikat di suatu daerah adalah 2.415.034, sehingga capaian kinerjanya adalah 13.95 %.
- b. Penanganan kasus tanah, dengan 21 kasus dan 6 kasus yang terselesaikan, sehingga capaian kinerjanya adalah 28.57 %.
- c. Penanganan ijin lokasi, dengan permohonan rekom ijin lokasi 65 dan 46 lokasi yang sudah memohon ijin, sehingga 70.77 % telah memenuhi target.

19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan nasional, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi akan terus dilaksanakan, serta dikembangkan dalam kerangka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik kemajemukan masyarakat perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram dengan memperhatikan kemandirian dan otonomi masyarakat untuk dapat menjamin kondisi kondusif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun jumlah kegiatan pembinaan politik daerah sebesar 3 % dan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP juga 3 %.

20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi, dimana dengan adanya otonomi daerah berarti daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya, sehingga otonomi daerah sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintah. Harapan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai upaya mewujudkan antara lain: kesetaraan politik (*political equality*),



yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan/ kesamaan politik; tanggung jawab daerah (*local accountability*), yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya; dan kesadaran daerah (*local responsiveness*), yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Adapun jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda adalah 6 Buah.

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban yang menjadi bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Pemberdayaan diharapkan mengarah kepada suatu pemahaman adanya upaya memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk maju ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan (*sustainable*), sebab pada hakekatnya setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Adapun kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

- a. Data jumlah PKK adalah 423, dengan 423 PKK aktif, sehingga 100.00 % terpenuhi target.



- b. Data jumlah posyandu adalah 2.816, dengan 2.253 posyandu aktif, sehingga 80.01 % telah terpenuhi.

22. Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban



masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai dari RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010 sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Data jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah yang terdapat di suatu daerah sebanyak 54 %
- b. Data Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun adalah 4.599, dan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun adalah 6.816, sehingga capaian kinerjanya adalah 67 %.
- c. Data Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan adalah 169.500, dengan 149.010 jumlah PMKS yang diberikan bantuan, sehingga capaian kinerjanya adalah 87.91 %.



23. Kebudayaan

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, disamping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata masih banyak masalah dan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran.

Bidang pengembangan budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat. Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	9.00%
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2180
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%

24. Statistik

Statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram/ grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Statistik sebagai metode ilmiah mengajak untuk melihat sesuatu secara berurutan dan sebagai alat untuk mengolah data numerik yang diperoleh sehingga menghasilkan informasi. Secara umum statistik akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. Adapun program yang dilaksanakan adalah ;

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.



25. Kearsipan

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya.

Pembangunan sistem informasi kearsipan nasional dalam kerangka sistem kearsipan nasional berfungsi untuk menyajikan informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal lembaga kearsipan kearsipan nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/ kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada lembaga-lembaga kearsipan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan. Adapun kegiatan beserta capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

- a. Data jumlah SKPD adalah 86 SKPD, dengan 78 Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku, sehingga 90.70 % telah terpenuhi.
- b. Data umlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip 35 %.

26. Perpustakaan

Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan



oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, oleh karenanya perpustakaan terus berupaya untuk menyediakan koleksi yang lengkap. Adapun kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan adalah :

- a. Data Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah 21.065, dengan Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 9.413, sehingga capaian kinerjanya adalah 44.69 %.

E. TUGAS PERBANTUAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah:

- 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 5) Rumah Sakit Umum Kapanjen melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- 7) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 8) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan



dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

- 9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sedangkan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam tugas Perbatuan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Bina Pembangunan Daerah
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
- 4) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
- 5) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
- 6) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 7) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
- 8) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 9) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 10) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
- 11) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
- 12) Penataan Administrasi Kependudukan
- 13) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

F. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Kebijakan dalam bidang Kerjasama antar daerah terutama dalam rangka untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, antara lain di bidang transportasi, pendidikan, Kesehatan, penanggulangan bencana, sumberdaya alam, perekonomian dan sosial budaya. Melalui



kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Daerah yang diajak kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain : Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

- a) Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan

No : $\frac{119}{07}$
421.022
2014

Bencana di wilayah perbatasan; Perjanjian Nomor: $\frac{130}{13}$ Tanggal 13 Pebruari 2014.

- b) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

1
70
Nomor: 120. $\frac{013}{2014}$

Nomor: $\frac{119}{07}$ $\frac{022}{2014}$ tanggal 3 Maret 2014.

- c) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman

1
12
Nomor: 120. $\frac{012}{2014}$

Posyandu dengan Nomor: $\frac{119}{16}$ $\frac{022}{2014}$ tanggal 4 Agustus 2014.

- d) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan

Nomor: $\frac{119}{19}$
421.022
2014

Nomor: 100 $\frac{418}{2014}$
Daerah



- e) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4. Nomor: 119/20/421.022/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- f) Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Badan KB

Nomor: $\frac{882}{HK} \cdot \frac{101}{J} \cdot \frac{1}{2014}$
Kabupaten Malang Nomor: $\frac{476}{421} \cdot \frac{201}{2014}$

tanggal 2 April 2014, tentang
Pengelolaan Pembangunan dan Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di
Kabupaten/Kota.

2. Hasil Output Kerjasama

- a) Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan Bencana di wilayah perbatasan; Dengan kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan bencana di wilayah perbatasan secara terpadu pada 3 tahap : Tahap Prabencana; Tahap Saat Tanggap Darurat; Tahap Pasca bencana. Objek kerjasama adalah kegiatan pada setiap tahapan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- b) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA); Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Malang agar tercapai derajat Kesehatan Masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Kerjasama tersebut berupa bantuan keuangan untuk perawat dan dokter, bantuan sosialisasi, bantuan pemulihan balita gizi buruk dan pembinaan taman posyandu.
- c) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman Posyandu; Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan dengan Hasilnya berupa pendekatan akses dan



peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat, pengembangan Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 382, pengembangan Puskesmas Rawat Inap Standart, pustu melayani rawat inap, pengembangan posyandu purnama atau mandiri dengan layanan tambahan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan BKB (Bina Keluarga Balita).

- d) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Daerah; Tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, meminimalisir ketimpangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan kedua daerah.
- e) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4. Untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah. Pada tahun 2014 telah dikirimkan/ditempatkan sebanyak 5 KK.
- f) Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Badan KB Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Pembangunan dan Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kerjasama ini adalah penyediaan alat kontrasepsi, pembangunan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

3. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Mitra yang Diajak Kerjasama

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagai mitra yang telah melaksanakan kerjasama pada tahun 2014 di Kabupaten Malang antara lain:

- 1) Kerjasama KUD Mina Jaya desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tentang Pelaksanaan Pelelangan Ikan di TPI Pondokdadap Sendangbiru;
- 2) Perjanjian sewa menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bakrie Telecom tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang.



- 3) Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Kerjasama PDAM Kabupaten Malang dengan PD. Jasa Yasa tentang Pemanfaatan Lahan dan Sumber Air di Unit Pemandian Metro Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- 5) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.
- 6) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Akademi Kebidanan Sukawati Lawang tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian.
- 7) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Telekomunikasi Indonesia tentang Implementasi Masyarakat Digital Kabupaten Malang berbasis Teknologi Informasi.
- 8) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Institut Pertanian Bogor.
- 9) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan *Australia-Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)* tentang Pelaksanaan kebijakan desentralisasi.
- 10) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Bupati Malang dengan *Stiching Nederlandse Ontwikkelings Organise* tentang Kerjasama pembangunan wilayah terpadu berkelanjutan.
- 11) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Malang dengan *Save the Children (SCI)* tentang Peningkatan gizi ibu, bayi dan bayi dibawah dua tahun (Baduta).
- 12) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Tabungan Negara tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi PNS Kabupaten Malang.
- 13) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. PLN Malang tentang Penyerahan Pengoperasian Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
- 14) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma Karangploso tentang Program Pengadaan Rumah Bersubsidi Bagi PNS.



- 15) Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang tentang Pelayanan Obat Penyakit Kronis dan Obat Kemoterapi bagi Peserta BPJS Kesehatan di Instalasi Farmasi RSUD Kanjuruhan Kapanjen.
- 16) Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang tentang Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 17) Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang tentang Pelayanan Rujukan *Ambulance* bagi peserta BPJS Kesehatan.
- 18) Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT. KAI (Persero).
- 19) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

4. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah Pemerintah Kabupaten Malang selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal dengan Kebijakan yang diambil adalah: (a) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, (b) meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, dan (c) melibatkan instansi vertikal dalam setiap kegiatan yang terkait.

5. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan Batas Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan



administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

G. PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata dalam rangka Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah dengan mengandalkan sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, perikanan) sebagai basis; yang dehele sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan infestasi sebagai lokomotif percepatan.

Pada tahun 2014 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.



Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2014.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2014 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Amin ya robbal alamin.

Malang, Maret 2015

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

